

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Tanpa pembenahan angkutan publik, maka potensi kepadatan lalu lintas akan terjadi. Oleh karenanya diperlukan alternatif kebijakan. Secara teoritis, analisis kebijakan publik dapat mendasarkan argumennya tidak hanya pada pertimbangan teknis ekonomis, tetapi juga pada pertimbangan sosiologis politis. Pendapat publik penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan alternatif kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, ragam alternatif kebijakan tersebut lahir tidak hanya disebabkan adanya dialog kolaboratif di antara aktor kebijakan, tetapi dialog tersebut tidak dapat terselenggara tanpa adanya komitmen elit pemerintah yang memfasilitasi (*fasilitative leadership*) dan adanya kesadaran dan wahana bagi masyarakat menyuarakan kepentingannya (*civil society*).

Berdasarkan proses dialog antar aktor kebijakan lahir beberapa alternatif kebijakan, di antara beberapa pilihan kebijakan reformasi pengelolaan transportasi publik merupakan alternatif ideal untuk menjawab tuntutan publik akan transportasi publik yang berkualitas dan dapat diandalkan. Kebijakan yang semestinya diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, antara lain :

1. Berkaitan dengan aspek teknis transportasi, mengubah basis moda transportasi publik dari angkutan kota (angkot) ke *Bus Rapid Transit* (BRT) atau moda lain yang lebih memadai, mengatur dan

menyinerjikan trayek dengan moda transportasi publik lainnya dalam sistem transportasi kota yang terpadu dan memperbaiki pola operasional transportasi publik.

2. Berikan dengan manajemen pengelolaan, membuka ruang perubahan pola pengelolaan angkutan publik untuk tidak lagi dikelola oleh privat, namun dikelola bersama oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
3. Berikan dengan kebijakan, memberikan ruang bagi masyarakat dan akademisi untuk lebih terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kebijakan tentang transportasi publik di Purwokerto.

5.2 Implikasi

Secara teoritik, dalam ranah studi kebijakan publik penelitian ini memberikan catatan bahwa tanpa komitmen dari kepemimpinan yang senantiasa memfasilitasi keberpihakan pada kepentingan publik dan adanya kesadaran serta wahana bagi masyarakat menyuarakan kepentingannya, maka proses pelibatan publik dalam proses analisis kebijakan belum akan terjadi. Oleh sebab itu, tidak cukup memahami analisis kebijakan deliberatif sebagai upaya pelibatan publik itu sendiri dalam proses analisis kebijakan publik, Publik dalam perspektif analisis kebijakan deliberatif menjadi elemen kunci yang menda sari argumen pertimbangan alternatif kebijakan, meskipun demikian keberadaan *fasilitative leadership* dan *civil society* menjadi pintu masuk bagi dimungkinkannya pendapat publik untuk didengar dalam suatu musyawarah kebijakan.

Secara praktis, berdasarkan kesimpulan penelitin, berimplikasi pada beberapa hal, antara lain:

1. Perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan prasarana jalan dan wilayah untuk mendukung berlakunya moda transportasi publik yang lebih baik.
2. Perlu dibentuk suatu badan usaha mandiri bidang transportasi publik yang bertugas menyelenggarakan atau menjadi operator transportasi publik.
3. Perlu dibentuk forum kebijakan yang sekaligus menjadi dewan pengawas penyelenggaraan transportasi publik untuk menghasilkan kemufakatan kebijakan melalui keterlibatan segenap pihak yang terkait kebijakan transportasi publik.
4. Perlu dilakukan perubahan Perda Banyumas No 13 Tahun 2005 dan pembentukan peraturan daerah baru sebagai payung hukum lahirnya badan usaha mandiri penyelenggara transportasi publik dan dewan pengawas transportasi publik.